

POLA INTERAKSI UMAT HINDU–NASRANI: STUDI KERUKUNAN BERAGAMA DI DESA DALUNG

I G. A. Artatik

Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar
e-mail: ayuartatik01@gmail.com

Abstract

The rapid development of the tourism industry brings the impact of mixed cultural heterogeneity into one. This gives a distinctive style for Balinese culture based on the spirit and values of Hinduism. As well as having a paradigm that has been attached to the Balinese, that the Balinese people are very open, tolerant, and friendly to the existence of tribes, nations or other religions. However, contact or interaction with migrant communities will of course provide an influence, both intentional and unintentional for both parties to interact, as is the case in Dalung village. Where interaction with Christianity both Catholicism and Protestantism (Christian) has occurred since 1936, marked by the establishment of the first Church in Bali located in the village of Adat Tuka, Dalung Village. Some Dalung villagers convert (religious conversion) from Hinduism to Catholicism and Protestantism. But today there is also a return to the religion of origin is the Hindu religion. As a society that consists of two communities, namely Christians and Hindus is very aware of the possibility of conflict because ideologically these two beliefs are different. But in the course of history there has never been a meaningful conflict. Although the emergence of conflict is usually solved by both parties by way of deliberation and kinship.

Keywords: *Interaction, Hindus, Christians, Religious Harmony*

Abstrak

Pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa dampak heterogenitas kultural yang bercampur baur menjadi satu. Hal ini memberikan corak tersendiri bagi kultur masyarakat Bali yang berbasiskan spirit dan nilai-nilai agama Hindu. Serta memiliki paradigma yang selama ini melekat pada orang Bali, bahwa orang Bali adalah orang yang sangat terbuka, toleran, dan ramah terhadap keberadaan suku, bangsa ataupun agama lain. Namun kontak atau interaksi dengan masyarakat pendatang tentu saja akan memberikan suatu pengaruh, baik secara disengaja maupun tidak disengaja bagi kedua belah pihak yang berinteraksi tersebut, seperti halnya yang terjadi di desa Dalung. Dimana interaksi dengan agama Nasrani baik paham Katolik dan paham Protestan (Kristen) telah terjadi sejak tahun 1936, ditandai dengan didirikannya Gereja pertama di Bali yang bertempat di Desa Adat Tuka, Desa Dalung. Beberapa masyarakat desa Dalung beralih agama (konversi agama)

dari Hindu ke Katolik dan Protestan. Namun dewasa ini ada juga yang kembali lagi ke agama asal yaitu agama Hindu. Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas dua komunitas, yaitu Nasrani dan Hindu sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik sebab secara ideologi kedua keyakinan ini memang berbeda. Namun dalam perjalanan sejarahnya belum pernah terjadi konflik yang sangat berarti. Walaupun muncul konflik biasanya diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Kata Kunci : *Interaksi, Umat Hindu, Umat Nasrani, Kerukunan Beragama*

I. Pendahuluan

Agama diharapkan dapat membangkitkan kesadaran tentang betapa penting dan bernilainya kehadiran orang lain yang mungkin memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri. Kesadaran tentang pentingnya kehadiran orang lain sehingga memberikan peluang bagi eksistensi diri serta tumbuhnya kesantunan individu dan toleransi terhadap orang lain. Konsep toleransi memang pilihan yang cukup baik dalam rangka terbangunnya suatu komunitas nasional yang heterogen dan tidak menumbuhkan konflik serta pertentangan.

Walaupun secara yuridis, negara menjamin kebebasan setiap umat untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya dan keyakinannya, namun dalam kenyataannya ternyata agama disinyalir telah menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini. Ketulusan pengabdian pada Tuhan sering membuat manusia tidak peduli pada dirinya sendiri dan nasib orang lain. Pemahaman yang dangkal dan keliru membuat agama sebagai pemicu terjadinya berbagai kekerasan dalam masyarakat. Ironis rasanya ketika kebenaran yang demikian diyakini sebagai kebenaran yang suci dan mutlak (Mul Khan, 2005; 23)

Sebagai bangsa yang terbentuk berdasarkan paham keberagaman atau pluralisme yang merupakan anugrah Tuhan yang tidak ternilai. Tatanan realitas masyarakat Indonesia yang plural tersebut

sering kali dihadapkan pada dua persoalan yaitu; di satu sisi keberagaman suku, agama dan ras yang dikenal dengan sebutan SARA menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dianggap sebagai aset karena dengan ke-multi-etnik-kan tersebut bangsa lain memandang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ciri khas, sehingga menjadi jelas perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Pada sisi lain, bahwa Indonesia memiliki kecenderungan menyimpan potensi konflik dan berbagai aksi-aksi yang berlatar belakang SARA. Setiap agama sudah dapat dipastikan mengajarkan umatnya selalu berbuat baik dan benar. Jadi Agama disamping dipandang sebagai faktor integritas sosial juga menjadi laten konflik sosial

Menurut Liliweri (2005; 37), multikulturalisme bertautan dengan doktrin atau “isme” tentang kesadaran individu atau kelompok atas keberagaman kebudayaan dan agama yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerjasama diantara beragam etnis dan ras. Dari pernyataan ini ada dua hal penting tentang multikulturalisme yaitu adanya proses kesadaran individu atau kelompok atas keberagaman, dan adanya tujuan mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog dan kerjasama diantara beragam etnis dan ras.

Gagasan multikulturalisme itu merupakan kenyataan bahwa sebenarnya diri seseorang, diri suatu komunitas

kebudayaan ataupun agama sebenarnya terbangun dari aneka budaya, bahkan diri sendiri dan orang lain tidak pernah terpisahkan dan telah menjadi satu kesatuan. Fenomena ini merupakan kesanggupan untuk saling menghargai budaya dan agama masing – masing komunitas, hal ini tampak dalam kehidupan masyarakat desa pekraman atau desa adat.

Desa adat atau desa pekraman adalah kesatuan hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Khayangan Tiga* atau *Khayangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan pengertian tersebut desa adat atau desa pekraman merupakan lembaga tradisional yang bercorak sosial religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonomi berdasarkan hak asal usulnya. Dengan lain kata desa adat dapat menetapkan aturan–aturan yang dibuat sendiri disebut dengan awig – awig. Penyusunan awig–awig desa bersumber dari falsafah *Tri Hita Karana*, yaitu adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antar manusia dengan alam (Sirtha, 2008; 1)

Di daerah Bali, selain berlaku sistem pemerintahan desa pekraman atau desa adat, juga ada pemerintahan desa dinas. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa adat atau desa pekraman mengatur urusan adat dan agama, sedangkan desa dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan bermasyarakat antara desa adat dengan desa dinas dapat berjalan harmonis, namun dapat juga terjadi konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa dampak heterogenitas kultural yang bercampur baur menjadi satu. Hal ini memberikan corak tersendiri bagi kultur masyarakat Bali yang berbasiskan spirit dan nilai – nilai agama Hindu. Serta memiliki paradigma yang selama ini melekat pada orang Bali, bahwa orang Bali adalah orang yang sangat terbuka, toleran, dan ramah terhadap keberadaan suku, bangsa ataupun agama lain. Namun kontak atau interaksi dengan masyarakat pendatang tentu saja akan memberikan suatu pengaruh baik secara disengaja maupun tidak disengaja bagi kedua belah pihak yang berinteraksi tersebut, seperti halnya yang terjadi di desa Dalung. Dari latar belakang inilah penulis ingin mengungkap tentang Pola Interaksi Umat Hindu – Umat Nasrani, Studi Kerukunan Beragama di Desa Dalung.

II. Pembahasan

a. Pengertian Interaksi Kerukunan Beragama Umat Hindu – Umat Narsani

1. *Interaksi*

Secara garis besar interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*co- operation*), persaingan (*competicion*), dan bahkan dapat berwujud pertentangan (*conflik*). Soerjono Soekanto (dalam Zainuddin. 2005;17), mengatakan bahwa Interaksi sosial adalah merupakan hubungan–hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok–kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena

itu interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang.

2. *Umat Hindu*

Umat Hindu di konsepsikan sebagai masyarakat yang menyakini tentang ajaran Agama Hindu. Adapun ciri – ciri yang dapat digunakan untuk mengenali masyarakat Hindu adalah; 1) Suatu kelompok orang yang percaya dan melaksanakan secara dominan konsepsi Panca Sradha, yaitu lima konsepsi dasar keyakinan Agama Hindu yang berintikan percaya dengan *Brahman*, Percaya terhadap *Atman*, Percaya dengan adanya *Hukum Karma Pala*, Percaya dengan *Punarbhawa*, dan percaya dengan *Moksa*. 2) Suatu kelompok orang yang dalam setiap perilakunya dominan mencerminkan pelaksanaan konsep Tat Twam Asi, yang merupakan filsafat kesusilaan tanpa batas. Jadi umat Hindu selalu bersikap kompromis terhadap sesamanya, sekalipun berbeda golongan, etnis maupun agama. 3) Suatu kelompok orang yang dalam setiap perilakunya dominan mencerminkan pelaksanaan konsep Karma Marga, yaitu perilaku pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamboh. 4) Memiliki naluri Seni yang didominasi oleh pelaksanaan konsep Bhakti Marga, yaitu pelaksanaan hidup beragama berkorban secara ikhlas dalam proses mendekati diri dengan Tuhan dengan mewujudkan kreativitas seni, baik dalam fungsinya sebagai persembahan, maupun untuk meningkatkan solidaritas sosial sebagai identitas diri masyarakat Hindu.

3. *Umat Nasrani*

Umat Nasrani dikonsepsikan sebagai masyarakat yang menyakini ajaran Yesus

Kristus, dimana Kristus merupakan gelar kehormatan keagamaan bagi Yesus. Kitab sucinya disebut dengan Injil. Umat Nasrani adalah dua kelompok umat atau masyarakat yang menyebutkan dirinya dengan sebutan Umat Katolik dan Umat Protestan (Kristen). Tempat ibadah umat Katolik disebut dengan Gereja Katolik atau Gereja Patriarch atau Rasuli, sedangkan tempat ibadah untuk umat Protestan disebut dengan Gereja Injil. Adapun perbedaan antara Agama Katolik dengan Agama Protestan adalah Agama Katolik menganggap bahwa Paus dan Pendeta berhak menerima penebusan dosa, sedangkan Agama Protestan tidak mengenal tokoh Paus dan para Pendeta menerima penebusan dosa. Agama Katolik melarang imam atau pendetanya untuk menikah, sedangkan Agama Protestan pendetanya boleh menikah. Agama Katolik pada perjamuan suci membedakan hak antara pendeta dengan orang biasa, sedangkan Protestan tidak ada perbedaan antara pendeta dengan orang biasa disaat perjamuan suci.

4. *Kerukunan Beragama*

Kerukunan dalam kehidupan beragama dapat tercipta apabila tiap – tiap orang saling tenggang rasa dan bertoleransi. Untuk mewujudkan adanya kerukunan antar umat beragama dapat pula dengan menerima perbedaan, artinya setiap umat percaya bahwa agama yang dipeluknya itulah agama yang paling baik, dan diantara agama satu dengan yang lainnya selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan. Dalam kehidupan bermasyarakat di Bali khususnya mengenai peran *awig – awig* dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama secara umum, juga dalam konsep *Tri Hita Karana* termasuk dalam hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Sifatnya lebih umum yang membahas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan

sesama, dan hubungan manusia dengan alam sebagai implementasi ajaran *Tri Hita Karana*. Ajaran inilah yang memperkuat kerukunan hidup beragama di Bali, saling menghormati dan saling toleransi terhadap keyakinan agama lain. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang Multikultur.

b. Pola Interaksi Kerukunan Beragama Umat Hindu–Nasrani di Desa Dalung.

Desa Dalung termasuk salah satu jalur pariwisata karena terletak paling utara dari Kecamatan Kuta Utara. Daerah Kuta dan sekitarnya merupakan kantong – kantong industri pariwisata selain Ubud dan Sanur. Desa Dalung merupakan satu desa dinas yang dipimpin oleh seorang Perbekel dan wilayahnya dibagi menjadi tiga Desa Adat, yaitu Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka. Sebagai ciri khas dari wilayah desa adat adalah adanya bangunan suci berupa *Pura Khayangan Tiga*.

Begitu juga halnya di desa Dalung, di setiap wilayah desa adat ada bangunan suci berupa *Pura Khayangan Tiga*. Yang menjadi unik bahwa di setiap desa adat di Desa Dalung, disamping ada *Pura Khayangan Tiga* juga berdiri bangunan Gereja sebagai tempat untuk beribadah umat Nasrani yaitu umat Katolik dan umat Protestan, seperti di Desa Adat Padang Luwih ada Gereja yang lokasinya di Banjar Tegal Jaya untuk umat Protestan, di Desa Adat Dalung ada Gereja yang lokasinya di Banjar Untal-Untal untuk umat Protestan, dan di Desa Adat Tuka ada Gereja yang lokasinya di Banjar Tuka untuk umat Katolik. Bahkan Gereja Katolik yang ada di desa Adat Tuka tersebut merupakan Gereja tertua di Bali yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 12 Juli 1936 oleh Pastor Kersten, dan peresmian pada tanggal 14 Pebruari 1937 oleh Mgr. Abraham dari Michigan City, Amerika Serikat (Wawancara, Purnayasa; Tanggal 2

Pebruari 2018).

Salah satu dampak dari interaksi masyarakat Bali dengan para pendatang adalah terjadinya konversi agama. Aryadharna (2011; 8) berpendapat bahwa Konversi agama Hindu ke Kristen ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa fase, dilakukan oleh para *missi zending* yang datang ke Bali sebagai wisatawan ataupun peneliti yang mengkaji kebudayaan Bali. Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya dan khususnya di Desa Dalung memiliki sifat yang terbuka dan toleran terhadap pendatang. Hal ini juga membuka peluang semakin berkembangnya jumlah penduduk pendatang yang non Hindu ke desa Dalung. Umat Nasrani baik yang menganut paham Katolik maupun Protestan yang bertempat tinggal dimasing – masing desa Adat yang ada di Desa Dalung, di samping merupakan penduduk pendatang sebagian besar mereka adalah penduduk lokal desa Dalung yang mengalami konversi agama dari Hindu ke Katolik dan ke Protestan, yang berawal dari Tahun 1963. Namun pada tahun belakangan ini banyak juga masyarakat Dalung yang mengalami Rekonversi Agama.

Mengingat sebagian besar dari mereka adalah masyarakat lokal yang mengalami konversi agama, maka dalam kesehariannya mereka menjalankan kehidupan bermasyarakat selayaknya tradisi Hindu di Bali, seperti saling *ngejot* apabila ada perayaan hari raya , saling *nguopin* atau *metetulung* (saling membantu) apabila ada upacara keagamaan, saling *mejenukan* apabila ada salah satu umat yang meninggal dunia, begitu juga ada yang saling *kejuang* atau menikah antara umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung.

Bahkan ada beberapa keluarga umat Katolik dan umat Protestan setelah orang tuanya meninggal anak dan cucunya kembali lagi menganut agama Hindu yang dikenal dengan Rekonversi Agama Kasus

rekonversi agama adalah perpindahan kembali dari umat Hindu ke Kristen dan kembali ke Hindu. Perpindahan agama ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Akibat hukum yang ditimbulkan dari rekonversi dapat diselesaikan dengan upaya secara hukum Hindu, upaya secara hukum adat Bali dan upaya secara hukum nasional. Upaya hukum tersebut juga ditunjang dengan upaya sosial untuk rehabilitasi sosial akibat kembali lagi memeluk agama Hindu bagi masyarakat desa Dalung.

Strategi pola interaksi kerukunan umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung berkaitan dengan strategi budaya hukum yaitu ajegnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kerukunan beragama. Dan strategi struktur Hukum yaitu efektifnya peran penegak hukum yaitu peran serta prajuru desa adat dalam menciptakan kerukunan beragama antara umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung.

Berkenaan dengan strategi pola interaksi kerukunan beragama antara Umat Hindu dengan Umat Nasrani di desa Dalung sesuai dengan paham fungsionalisme struktural. Fredrik Barth (dalam Hamilton.1998:17) mengatakan fungsionalisme struktural sifat tatannya harus bersifat umum bagi semua hubungan antaretnik dan merupakan seperangkat peraturan yang sistimatis untuk mengatur kontak sosial antaretnik. Hubungan antaretnik yang stabil membutuhkan adanya struktur interaksi, perangkat ketentuan yang mengatur cara hubungan, dan memungkinkan adanya hubungan dibeberapa bidang kegiatan, serta perangkat ketentuan tentang situasi sosial yang melarang adanya interaksi antaretnik disektor lain.

Semua kondisi ini akan mencegah terjadinya konfrontasi dan modifikasi dari budaya yang telah ada. Berdasarkan asumsi-

asumsi yang dikembangkan dalam teori ini kerukunan hubungan antar etnik umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung akan menjadi lebih efektif perlu ditetapkan dalam sistem dan struktur sosial budaya untuk mengatur tata cara hubungan yang memungkinkan adanya hubungan dibeberapa bidang kegiatan, dimana kegiatan ini akan memberikan rasa toleransi dan kebersamaan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di desa Pakraman.

Perda Propinsi Bali Nomer 03 Tahun 2001 tentang desa pakraman menyatakan bahwa desa pakraman adalah wilayah hukum adat yang ditempati oleh krama desa secara turun temurun berdasarkan tata krama pergaulan Hindu. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian, mengingat tidak jarang ditemukan pada sebagian dari desa pakraman di Bali, bahkan banjar yang *kramanya* bukan beragama Hindu saja. Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas dua komunitas, yaitu Nasrani dan Hindu sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik sebab secara idiologi kedua keyakinan ini memang berbeda. Namun dalam perjalanan sejarahnya belum pernah terjadi konflik yang sangat berarti. Walaupun muncul konflik biasanya diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah.

Jadi Interaksi Simbolik digunakan untuk menganalisa bentuk interaksi kerukunan beragama umat Hindu dengan umat Nasrani di Desa Dalung. Dalam perspektif teori interaksi simbolik pada dasarnya berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subyek yang dikaji. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dilihat sebagai proses yang melibatkan individu – individu untuk membentuk perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang – orang yang berinteraksi dengan mereka (Mulyana, 2003: 230).

Mead (1934) dan Blumer (1969)

(dalam Ratna, 2005: 193), secara ringkas menyatakan, interaksi simbolik dibangun berdasarkan premis – premis sebagai berikut; *Pertama*, individu merespon situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan berdasarkan makna yang dimilikinya. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak mekanis atau ditentukan faktor eksternal, melainkan individu sangat menentukan lingkungan mereka sendiri dalam proses interaksi sosial. *Kedua*, individu membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Mereka membayangkan bagaimana orang lain akan merespon tindakan mereka sebelum mereka sendiri bertindak.

Proses pengambilan peran tersembunyi ini penting, meskipun tidak dapat diamati. Jadi interaksi simbolik mengakui tindakan dalam dan tindakan luar sebagai kelanjutan dari tindakan dalam. Akan tetapi, tindakan luar tidak otomatis menunjukkan tindakan dalam, karena tindakan luar merupakan pengelolaan kesan untuk menyenangkan khalayak tertentu, atau untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. *Ketiga*, karena makna adalah produk interaksi sosial, makna tersebut mungkin berubah lewat interpretasi individu ketika situasi yang diketemukan dalam interaksi sosial juga berubah. Konsensinya perilaku berubah, karena makna sebagai basis perilaku juga berubah.

Teori fenomenologi sebagai pendukung teori interaksi simbolik dalam memecahkan permasalahan mengenai perlunya pola interaksi kerukunan beragama umat Hindu dengan Umat Nasrani di desa Dalung. Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak dipermukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku sebab realitas itu sesungguhnya bersifat subyektif dan

maknawi (Bungin. 2007:9)

Situasi keamanan yang semakin kondusif mendorong terjadinya strukturasi keberagaman Umat Hindu dalam dimensi pengetahuan keagamaan, yaitu pengenalan, penyerapan dan penyebarluasan ajaran agama Hindu melalui kegiatan Pasraman yang secara rutin dilakukan oleh desa Pakraman pada tingkat anak-anak dan remaja selain pendidikan formal yang mereka dapatkan di sekolah, sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan dan praktek keagamaan Hindu. Sekaligus juga anak-anak dan remaja dibekali pengetahuan tentang pentingnya hidup berdampingan, toleransi dan saling menghormati orang lain. Konstruksi pengetahuan ini menjadi modal berharga bagi umat Hindu dalam kondisi kehidupan sosial keagamaan yang plural.

Dalam artian bahwa konstruksi pengetahuan tersebut tidak hanya diinternalisasi umat Hindu tetapi juga dieksternalisasikan kepada umat lain yang berbeda agama. Toleransi kerukunan umat beragama di Desa Dalung sangat tinggi, dapat dilihat saat perayaan hari – hari besar keagamaan dimana anak – anak dan remaja Nasrani ikut terlibat dalam membuat dan mengarak Ogoh – Ogoh saat Pengerupukan. Begitu juga saat hari raya Nasrani para Pecalang yang ada di sekitaran Banjar Adat yang ada Gerejanya ikut terlibat dalam pengamanan persembahyangannya. Tradisi saling mengunjungi yang dikenal dengan istilah *Medelokan*, *Mejenukan*, *Nyuopin* masih terjalin dengan baik sampai sekarang. Semoga interaksi positif seperti ini dapat mewarnai kerjasama walaupun berbeda keyakinan yang tentu saja dapat menghindari konflik karena perbedaan tersebut.

III. Penutup

a. Simpulan

1. Interaksi sosial merupakan proses

individu dalam melakukan hubungan sepanjang hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

2. Strategi pola interaksi kerukunan umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung berkaitan dengan strategi budaya hukum yaitu ajegnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kerukunan beragama.
3. Kerukunan hubungan antar etnik umat Hindu dengan umat Nasrani di desa Dalung akan menjadi lebih efektif perlu ditetapkan dalam sistem dan struktur sosial budaya untuk mengatur tata cara hubungan yang memungkinkan adanya hubungan di beberapa bidang kegiatan, dimana kegiatan ini akan memberikan rasa toleransi dan kebersamaan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di desa Pakraman.

b. Saran

1. Bagi masyarakat desa Dalung baik umat Hindu maupun Umat Nasrani hendaknya selalu menjaga pola interaksi kerukunan beragama sesuai dengan yang diatur dalam awig – awig aturan adat lainnya.
2. Bagi para tokoh adat dan agama baik tokoh Umat Hindu maupun tokoh Umat Nasrani di desa Dalung agar mampu memberi tuntunan dan menjadi panutan demi kerukunan hidup beragama.
3. Bagi pemerintah hendaknya turut memantau dan memberikan

perlindungan dan jaminan bagi kerukunan hidup beragama pada masyarakat di Bali

DAFTAR PUSTAKA

Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar : Pustaka Bali Post

Armini, I Gusti Ayu. 2004. *Profil Kerukunan Umat Beragama Di Dusun Angantiga Desa Petang Kabupaten Badung*. Denpasar: Jurnal penelitian Sejarah dan nilai Tradisional

Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi revisi)*. Jakarta: Reneka Cipta

Astiti, Tjok Istri Putra.dkk. 2011. *Implementasi Tri Hita Karana dalam Awig – Awig Desa Pakraman di Bali*. Denpasar: Udayana Universitas Press

Aryadharma, Surphi, 2011, *Membedah Kasus Konversi Agama di Bali*. Denpasar: Paramita

Darma Putra, I Nyoman (ed). 2004. *Bali Menuju Jagaditha Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali

Dharmayudha, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: PT Upada Sastra.

Gelgel, I Putu. 2006. *Hukum Hindu Ruang Lingkup dan Sumber-sumbernya*, Denpasar: Widya Dharma.

Griya, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Hamilton, Peter (ed). 1998. *Talcott Parsons Pemikirannya*. Yogyakarta: PT Tiara Kencana.

Imam Tholkhah. 2001. *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat*

- Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Margaret, M. Poloma. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan oleh Yosogama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martha, I Wayan dan I Putu Sastra Wibawa. 2015. *Implikasi Yuridis Rekonversi Agama*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia
- Mulkhan, Abdul Manir. 2005. *Dilema Manusia dengan Diri Tuhan, dalam Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana Deddy, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I Gede dan Ni Putu Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Kerukunan Umat Beragama. 2007. *Manajemen Konflik Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ratna, Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*, Terjemahan Muhamad Taufik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sedhawa, Ida Bagus (ed). 2005. *Membangkitkan Jati diri Masyarakat Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Denpasar: Pemerintah Propinsi Bali.
- Supartha, I Wayan. 2007. *Talenta Bali Menuju Otonomi Khusus*. Denpasar: Pansus Otsus DPRD Propinsi Bali.
- Triguna, I B Gde Yudha. 1996. *Materi Pokok Sosiologi Hindu*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.
- 2000. *Teori Tentang Simbol*. Denpasar: Widya Dharma.
- 2008. *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali Dalam Teropong Lokal, Nasional Global*. Denpasar: Widya Dharma.
- Windia, Wayan P. 2008. *Konflik adat dan Sanksi Kesepekan di Desa Adat Bungaya, Kabupaten Karangasem, Bali; Perspektif Kajian Budaya*. Denpasar: (Disertasi) Universitas Udayana.
- 2010. *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*. Denpasar: Majelis Utama Desa Pakraman Bali.
- 2013. *Hukum Adat Bali Dalam Tanyajawab*. Denpasar: Bali Shanti Udayana Universitas Press
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.